

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada instansi kesehatan pemerintah seperti puskesmas, aset tetap berfungsi sebagai pendukung operasional sekaligus sarana akuntabilitas negara atas penggunaan anggaran publik. Kualitas layanan kesehatan masyarakat yang diberikan secara langsung dipengaruhi oleh aset tetap seperti peralatan medis, jaringan air bersih, dan gedung layanan. Oleh karena itu, keberadaan dan pengelolaan aset tetap sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas layanan publik.

Perbedaan mendasar antara aset tetap di sektor pemerintah dan sektor swasta terletak pada tujuannya. Berdasarkan PSAK 16, di sektor swasta menilai aset tetap berdasarkan potensi keuntungan atau efisiensi operasional. Sementara itu di sektor pemerintahan, aset tetap lebih difokuskan pada pemanfaatan untuk kepentingan umum dan pelayanan jangka panjang sebagaimana diatur dalam PSAP No. 07 Tahun 2025. Selain itu, pencatatan aset tetap di pemerintahan diatur secara ketat oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan melibatkan tanggung jawab administratif yang lebih kompleks, karena berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan pemeriksaan oleh auditor negara. Oleh sebab itu, ketepatan dalam pengelolaan, pencatatan, dan penyusutan aset tetap menjadi sangat penting dalam sistem keuangan pemerintah daerah.

Sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2025 menyatakan bahwa aset tetap diakui sebagai aset tetap hanya jika memenuhi kriteria, yaitu berwujud, masa manfaat lebih

dari satu tahun, biaya perolehannya dapat diukur secara andal, serta tidak ditujukan untuk dijual dalam kegiatan operasional normal entitas. Ketidakwaiban dalam penyajian aset tetap dapat berdampak pada perkiraan turunan aset tetap. Hal ini disebabkan oleh kesalahan entitas dalam menetapkan nilai perolehan maupun pengeluaran setelah perolehan awal, yang dapat memengaruhi perhitungan beban penyusutan dan pada akhirnya memengaruhi laba serta kewajaran penyajian laporan keuangan.

Seiring dengan penggunaannya dalam kegiatan operasional sehari-hari, aset tetap akan mengalami penurunan nilai yang disebut dengan penyusutan. Dalam akuntansi pemerintahan, aset-aset tetap yang ada di neraca (kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan), akan mengalami penurunan nilai seiring dengan waktu pemakaian. Maka dari itu, agar nilai aset tetap dapat disajikan sesuai dengan nilai terkini, maka dilakukan penyusutan aset tetap. Selain itu, Penyusutan aset tetap juga mencerminkan penerapan prinsip akuntansi terkait pengakuan beban (*expense recognition*), yaitu beban dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Mengingat aset tetap digunakan selama lebih dari satu periode pelaporan, maka nilai perolehannya perlu dialokasikan secara sistematis ke dalam laporan operasional atau laporan laba rugi, sebanding dengan manfaat yang diperoleh pada setiap periode tersebut.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 Tahun 2025, terdapat tiga metode penyusutan aset tetap yang diakui, yaitu metode garis lurus (*straightline method*), metode saldo menurun ganda (*double declining method*), dan metode unit

produksi (*unit of production method*). Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK/06/2017, metode yang digunakan adalah metode penyusutan garis lurus, yang merupakan metode paling sederhana di antara yang lainnya. Beban penyusutan yang dicatat setiap periode melalui transaksi penyesuaian memiliki jumlah yang tetap sama.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pemanfaatan sistem informasi menjadi langkah strategis dalam mendukung laporan keuangan yang efektif dan efisien. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan pemerintah untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah dan mensinergikan keuangan dengan teknologi untuk membuat pengelolaan keuangan daerah lebih transparan dan akuntabel. Sebelum adanya SIPD, pemerintah daerah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah. Transisi dari SIMDA ke SIPD tentunya tidak dilakukan secara instan, melainkan memerlukan waktu adaptasi. Sehingga implementasi SIPD tidak dilakukan secara bersamaan karena tingkat kesiapan masing-masing pemerintah daerah tentunya berbeda (Afifah et al., 2023).

Puskesmas DK merupakan salah satu puskesmas non rawat inap yang beroperasi di Kabupaten X, Jawa Tengah. Puskesmas DK memiliki peran utama sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses dan bermutu bagi masyarakat di wilayah tanggungjawabnya. Keberadaannya turut mendukung pencapaian visi dan misi Dinas

Kesehatan Kabupaten X dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Selain menjalankan fungsi pelayanan, Puskesmas DK juga memiliki kewajiban dalam pengelolaan keuangan dan aset, termasuk penyusunan laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan awal disusun bersama Bendahara Keuangan Kabupaten (BKK), yang dikenal sebagai laporan *onface*. Selanjutnya, laporan ini akan melalui proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk menghasilkan laporan *audited* sebagai laporan akhir yang telah disesuaikan. Proses ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik, termasuk pada aspek pencatatan aset tetap.

Sebagai bagian dari instansi pemerintah, Puskesmas DK juga menggunakan SIPD dalam pengelolaan keuangannya. Pada tahun 2024, Puskesmas DK melakukan transisi dari sistem sebelumnya, yaitu SIMDA ke SIPD. Namun dalam proses transisi ini, puskesmas masih mengalami beberapa hambatan teknis. Salah satu masalah yang muncul adalah belum seluruh data tersinkronisasi dengan baik, khususnya terkait pencatatan beban penyusutan aset tetap. Hal ini menyebabkan adanya beban penyusutan yang belum tercatat secara akurat, sementara saldo ekuitas telah disesuaikan. Ketidaksesuaian ini kemudian berdampak pada timbulnya surplus/defisit dalam laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun berjalan.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang telah dilakukan oleh Pramana dkk (2022), menunjukkan bahwa masih ada kendala atau kelemahan dalam penerapan SIPD di

Nganjuk, seperti kurang efektif dan efisien, lemot, dan masih perlu didampingi oleh sistem yang lain, sehingga SIPD belum dapat diimplementasikan secara penuh karena masih banyak fitur yang belum tersedia termasuk pencatatan aset tetap. Permasalahan serupa juga ditemukan di Puskesmas DK, dimana proses penyusutan aset tetap belum dilakukan secara sistematis, yang berdampak pada keakuratan laporan keuangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul **“Analisis Komparasi Beban Penyusutan Aset Tetap (Peralatan) antara Laporan Keuangan Onface dan Laporan Audited tahun 2024 di Puskesmas DK”**.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membahas pokok-pokok pembahasan secara terarah dan sistematis. Ruang lingkup tersebut mencakup:

1. Pembahasan mengenai perhitungan beban penyusutan aset tetap (peralatan) di Puskesmas DK;
2. Komparasi perhitungan beban penyusutan aset tetap di Puskesmas DK dan analisisnya; dan
3. Proses pengadaan aset tetap di Puskesmas DK.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Mengkaji proses pencatatan beban penyusutan, mengidentifikasi kendala, membandingkan praktik dan teori.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai saran, masukan serta evaluasi kendala yang mungkin akan terjadi lagi pada Puskesmas DK.

b. Bagi Pembaca

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pembaca dan dapat menjadi referensi bagi studi-studi akademisi selanjutnya yang membahas topik yang sama atau serupa.

c. Bagi Program Studi D3 Akuntansi

Penelitian ini dapat menambah referensi pada perpustakaan Universitas Diponegoro BPK2U Pekalongan dan sebagai pertimbangan bagi pembaca khususnya mahasiswa jurusan akuntansi dalam melakukan penelitian dimasa mendatang.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Jenis Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data penelitian primer dan sekunder sebagai bahan penelitian Tugas Akhir.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016) Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utamanya. Pengumpulan data ini biasanya dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden atau

melalui pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Pada kegiatan ini penulis mengambil data primer melalui kegiatan wawancara dengan pembimbing lapangan dari staf KAP Purba Lauddin & Rekan Semarang yang memberikan penjelasan terkait beban penyusutan yang belum tercatat tersebut.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016) menyatakan bahwa Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung oleh peneliti, melainkan melalui perantara seperti pihak lain atau berasal dari berbagai dokumen yang sudah ada. Data sekunder berfungsi melengkapi data primer yang dikumpulkan secara langsung. Data yang digunakan berupa laporan aset tetap yang dimiliki, Laporan Operasional, CALK, dan peraturan maupun undang-undang yang relevan dengan topik ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan Tugas Akhir ini dibagi menjadi 4 bab yang terdiri dari sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang akan digunakan dalam laporan.

2. BAB II PROFIL INTANSI

Pada Bab ini berisi profil Puskesmas DK, Jenis Layanan, Struktur, Sarana & Prasarana, profil singkat KAP Purba Lauddin & Rekan Semarang.

3. BAB III PEMBAHASAN

Berisi uraian dari perbandingan antara tinjauan teori yang didapatkan pada saat melaksanakan perkuliahan dengan praktik yang dipelajari selama kegiatan kuliah kerja praktik.

4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan berdasarkan jawaban dari hasil analisis dari rumusan masalah yang dikaji pada bab sebelumnya. Selain itu juga disampaikan saran - saran untuk perbaikan SOP, pelatihan SDM, dan evaluasi sistem pencatatan yang digunakan.